

MUSEUM NEGERI:

Sebuah Upaya Melestarikan Memori Kolektif

Syahruddin Mansyur

Balai Arkeologi Ambon

Jl. Namalatu-Latuhalat, Ambon 97118

Email : balar.ambon@yahoo.com / hitam_putih07@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang upaya pelestarian memori kolektif masyarakat di wilayah Maluku melalui penawaran sebuah konsep pengelolaan Museum Negeri. Sejarah perkembangan permuseuman baik aspek teoretis maupun teknis telah melahirkan "museologi baru" sebagai paradigma baru pengelolaan museum. Dalam pandangan tersebut, pengelolaan museum berangkat dari kebutuhan masyarakat sehingga peran museum lebih diarahkan sebagai media pelestari memori kolektif dan penguat identitas masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut masyarakat semakin kritis dan menuntut keterlibatan mereka dalam pengelolaan museum. Eco museum sebagai salah satu bentuk pengelolaan museum berdasarkan paradigma "museologi baru" dirasakan sangat tepat dalam konteks pelestarian memori kolektif masyarakat Maluku.

Kata Kunci: *Museum, Museologi Baru, Memori Kolektif, Eco Museum, Maluku, Museum Negeri.*

Abstract

This paper discusses the effort to preserve the collective memory of communities in the Moluccas by offering a concept of management of the State Museum. The history of museum developments, both in the theoretical and technical aspects, has given rise to "new Museology" as a new paradigm of management of the museum. In this view, the management of the museum should be started from the needs of society so that the museum's role is more directed as a medium to conserve the collective memory and strengthen community's identity. Along with the development, the demand of community involvement has increased in the management of the museum. Eco museum as a form of management of the museum based on the paradigm of "New Museology" may function as an appropriate solution in the context of the collective memory preservation of Maluku people.

Keywords: *Museum, New Museology, Collective Memory, Eco Museum, State Museum*

PENDAHULUAN

Pengantar

Berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, sejarah pembentukan struktur pemerintahan di Maluku (Provinsi Maluku) memiliki karakteristik tersendiri. Di beberapa wilayah di Indonesia, secara umum mengenal struktur pemerintahan tradisional setingkat kerajaan atau kesultanan. Sementara itu, di Maluku dikenal sistem pemerintahan adat yang terdiri atas komunitas masyarakat setingkat desa, bahkan sebutan desa berdasarkan konteks sejarahnya tidak dikenal, tetapi disebut dengan negeri (kecuali beberapa negeri yang mengenal pembentukan konfederasi hingga membentuk kerajaan seperti dikenal, mis: Kerajaan Iha, Kerajaan Hitu, dll). Sistem pemerintahan negeri adat, mulai dikenal sejak masa VOC sekitar abad ke-17 (Leirissa, dkk., 1982: 1). Sistem pemerintahan tersebut berkembang dari struktur masyarakat tradisional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke wilayah ini sehingga negeri-negeri adat yang ada saat ini memiliki sejarahnya sendiri-sendiri.

Uraian di atas sekaligus memberi pemahaman tentang judul pada tulisan ini bahwa Museum Negeri yang dimaksudkan adalah museum yang dikelola oleh masyarakat adat yang tergabung dalam sebuah pemerintahan adat yang disebut negeri. Dengan demikian, topik tulisan ini berbeda dengan penyebutan Museum Negeri yang dikenal secara luas di Indonesia khususnya oleh Direktorat Museum bahwa Museum Negeri adalah museum yang didirikan di daerah, khususnya Provinsi yang merangkum informasi sejarah budaya dalam lingkup provinsi masing-masing.

Latar Belakang

Dewasa ini, berbagai konflik sosial sering muncul berkaitan dengan benturan identitas yang mengabaikan memori kolektif yang telah dipahami sebelumnya. Contoh kasus paling akhir adalah konflik yang terjadi pada September 2010, di Tarakan, Kalimantan Timur yang melibatkan salah satu etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan dan etnis terbesar di Kalimantan. Konflik ini berasal dari kasus kriminal di antara dua kelompok pemuda yang memiliki identitas atau berasal dari etnis yang berbeda. Konflik ini kemudian mengarah kepada isu SARA dengan munculnya wacana bahwa konflik terjadi antara etnis pendatang dan etnis pribumi. Jika menelusuri sejarah yang merupakan bagian dari memori kolektif, kedua etnis yang ada di Tarakan ini memiliki ikatan persaudaraan yang dapat ditelusuri pada sekitar 1730-an yang ditandai dengan ikatan perkawinan di antara kedua bangsawan etnis tersebut (Zulkarnaen, 2010). Demikian halnya, generasi saat ini pun memiliki ikatan

perkawinan campuran antar etnis pendatang dan etnis pribumi (Salam, 2010: 131). Kasus Tarakan ini tentunya hanya salah satu dan merupakan kasus terakhir dari sekian banyak daftar konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Gambaran singkat tentang kasus Tarakan ini memberi pelajaran akan pentingnya memelihara dan melestarikan memori kolektif masyarakat sebagai upaya untuk menjaga solidaritas.

Dalam konteks wilayah Maluku, tentunya masih kuat dalam ingatan pada konflik sosial 12 tahun yang lalu. Selain konflik sosial tersebut, kasus-kasus lain pada skala wilayah lebih kecil masih sering terjadi adalah konflik antar negeri. Kasus-kasus ini pada umumnya mempersoalkan batas wilayah negeri yang diklaim oleh masing-masing negeri yang bertetangga. Demikian halnya dengan pemahaman sejarah negeri yang seringkali memunculkan berbagai versi. Contoh-contoh kasus ini pun masih terkait dengan perbedaan persepsi tentang memori kolektif yang dipahami oleh masing-masing pihak.

Dalam kerangka inilah, wacana tentang pendirian museum negeri di wilayah Maluku menjadi penting sebagai upaya melestarikan memori kolektif masyarakat. Hal ini terkait dengan peran museum sebagai pembentuk identitas, dimana memori kolektif adalah salah satu identitas yang dipahami bersama oleh masyarakat. Pilihan terhadap struktur pemerintahan negeri sebagai bagian dari memori kolektif tidak lepas dari karakteristik pembentukan struktur masyarakat hingga terbentuk menjadi struktur pemerintahan tingkat desa yang saat ini diberlakukan di Maluku. Demikian halnya, bahwa negeri-negeri adat yang ada saat ini, meski secara umum memiliki ciri yang sama tetapi tetap memiliki karakteristik sumberdaya budaya, baik tinggalan budaya materi (*tangible*) maupun non materi (*intangible*).

Permasalahan

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang berbagai permasalahan sosial dan pentingnya pelestarian memori kolektif serta peran museum sebagai penguat identitas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan aspek teoretis pengelolaan museum dalam kaitannya dengan pelestarian memori kolektif ?
2. Sumberdaya budaya apa saja yang dapat ditampilkan oleh museum dalam kaitannya dengan memori kolektif masyarakat di wilayah Maluku ?
3. Bagaimana bentuk pengelolaan museum dalam konteks pelestarian memori kolektif masyarakat di wilayah Maluku ?

Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tulisan ini dimaksudkan sebagai tinjauan awal atas upaya pelestarian memori kolektif melalui bentuk pengelolaan sebuah museum. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan sebuah bentuk ideal pengelolaan museum di wilayah Maluku. Hasil dari pembahasan ini pula diharapkan dapat memberi manfaat praktis tentang bentuk pengelolaan museum dalam kaitannya dengan pelestarian memori kolektif masyarakat di wilayah Maluku.

Kerangka Konseptual

Secara umum, fungsi dan peran museum tidak hanya sebagai tempat untuk menampung dan memamerkan benda-benda budaya, akan tetapi sebagai media komunikasi antara benda budaya dan masyarakat (pengunjung). Sebagaimana dikemukakan oleh Szekeres (2005), terkait dengan peran museum bahwa “... *they have provided a link with the past, they have preserved examples of the finest in human endeavour, and they have legitimised social changes that have already taken place*” (Szekeres, 2005: 1 dalam Salam, 2010: 28). Demikian halnya, dikemukakan oleh Pinna (2001), bahwa museum menampung masa lalu, tradisi dan memori kolektif sebagai cerminan masyarakat untuk menemukan identitas diri mereka sendiri (Pinna, 2001: 4 dalam Salam, 2010: 4). Dalam kaitan identitas dan memori kolektif tersebut Davidson (2005), menyatakan bahwa warisan budaya termasuk bentang alam dan budaya; situs-situs budaya; serta monumen dan *material culture* di museum berhubungan dengan memori. Warisan budaya tersebut memiliki peranan penting untuk membentuk memori kolektif dalam arti melestarikan, menginterpretasikan, dan menyajikan memori tersebut (Davidson, 2005: 184; Perdana, 2010: 26).

METODE PENELITIAN

Dalam kerangka pelestarian memori kolektif, tulisan ini dimaksudkan sebagai tinjauan awal atas wacana pendirian museum negeri. Tinjauan dilakukan terhadap perangkat teoretis pengelolaan museum dalam kaitan peran lembaga museum, dan tinjauan terhadap potensi sumberdaya budaya sebagai bagian dari memori kolektif. Selanjutnya, pada bagian akhir diuraikan beberapa hal terkait dengan wacana pendirian museum negeri. Dengan demikian, tulisan ini menggunakan metode penelusuran kepustakaan yaitu terkait dengan sejarah

perkembangan aspek teoretis pengelolaan museum serta data pustaka terkait dengan sumberdaya budaya yang ada di wilayah Maluku.

Tinjauan umum terhadap perangkat teoretis pengelolaan museum menguraikan tentang sejarah pengelolaan museum serta aspek-aspek teoretis lain terkait dengan perubahan paradigma dalam pengelolaan museum. Oleh karena itu, uraian pada perangkat teoretis adalah sebuah uraian tentang konsep pengelolaan museum secara umum. Dengan demikian, perangkat teoretis tidak secara khusus ditempatkan pada konteks kerangka teoretis untuk melakukan analisa terhadap pembahasan pada tulisan ini. Hal ini, setidaknya berlandaskan pada dua alasan, yaitu: *pertama*, pembahasan tidak dimaksudkan secara khusus pada salah satu negeri adat sebagai studi kasus; *kedua*, bahwa tulisan ini adalah tinjauan awal untuk memberikan pemahaman tentang konsep ideal pengelolaan museum.

Sementara itu, tinjauan terhadap potensi sumberdaya budaya menguraikan tentang tinggalan budaya yang ada dan merupakan warisan budaya yang terangkum secara umum dalam sejarah negeri di Maluku. Tinjauan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian arkeologi yang pernah dilakukan maupun sumber-sumber lain yang memuat tentang sumberdaya budaya yang ada di Maluku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Perubahan Paradigma Pengelolaan Museum

➤ Pengertian Museum

Pada awalnya, museum merupakan tempat pemujaan terhadap dewi seni dan ilmu pengetahuan. Kata museum sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *Mouseion*, istilah yang sering pula digunakan untuk menyebut tempat berkumpul para cendikiawan, tempat penelitian, kuliah, perpustakaan dan lainnya (Murray, 1904; Moore, 1994; McLean, 1997 dalam Sulistyowati, 2009: 18). Museum mulai berkembang sekitar abad ke-16, ditandai dengan kegemaran bangsawan Eropa mengumpulkan benda-benda kuno dan antik yang berasal dari berbagai tempat. Kegiatan ini kemudian mulai dilembagakan pada 1572, dengan dibentuknya *The Society of Antiquaries of London* (Masyarakat Pecinta Benda Antik/Kuno di London) (Hudson, 1987). Selanjutnya, sekitar abad ke-17 dan 18, seiring dengan kegiatan kelembagaan tersebut, museum kemudian berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan koleksi benda-benda antik. Pada perkembangan awal ini muncul istilah *cabinets of curiosity*, dimana museum menjadi tempat yang sangat eksklusif yang hanya

terbuka bagi kalangan terbatas, sehingga museum hanya berperan sebagai tempat untuk menunjukkan status sosial seseorang (McLean, 1997:10-11 dalam Sulistyowati, 2009:18). Perkembangan ini, tentunya bertolak belakang dengan pemahaman museum sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana pengertian museum yang berasal dari kata *Mouseion*. Pada periode ini, satu-satunya museum yang dibuka untuk umum adalah museum yang dikelola oleh pihak Universitas dan pemerintah kota Basel yang sebelumnya telah membeli koleksi pribadi milik *Amerbach Cabinet* pada 1661 dan dibuka untuk umum pada 1671.

Selanjutnya, pengertian museum mulai memasuki era baru seiring meningkatnya minat dan rasa ingin tahu masyarakat umum terhadap benda-benda antik. Tuntutan tersebut kemudian mendapat perhatian kalangan *antiquarian*, yang berupaya memberi penjelasan ilmiah tentang asal-usul benda-benda yang tersimpan di museum - sebuah upaya yang kemudian menjadi awal lahirnya ilmu baru yaitu arkeologi. Tuntutan ini sekaligus mendapat perhatian sekitar abad ke-18 dan 19, dengan semakin banyaknya museum yang dibuka untuk umum serta meningkatnya pembatasan pengunjung. Pada tahun 1808 di British Museum misalnya terjadi peningkatan pembatasan jumlah pengunjung dari sebelumnya hanya 6 orang perhari menjadi 120 orang perhari. Selanjutnya, pada tahun 1810 setiap orang yang berpakaian rapi diperbolehkan mengunjungi museum (Hudson, 1987: 23). Dengan demikian, era ini menjadikan museum dapat diakses oleh setiap lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, museum tidak lagi sekadar tempat menyimpan benda-benda kuno tetapi telah berkembang sebagai tempat penelitian dengan adanya upaya untuk memberi informasi pada setiap koleksi yang dimilikinya. Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap museum, membawa perubahan pada pengelolaan museum yang lebih serius – sebuah tuntutan yang kemudian melahirkan museologi (Magetsari, 2008; Sulistyowati, 2009:19).

Saat ini, definisi museum yang menjadi pedoman pengelolaan dan pengembangan museum skala internasional sebagaimana dirumuskan oleh *International Council of Museum* (ICOM), yang dideklarasikan tahun 1974 di Copenhagen, Denmark, sebagai berikut:

"A museum is a non profit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, communicates, and exhibits, for the purpose of study education and enjoyment, material evidence of man and environment."

Rumusan definisi tersebut kemudian direvisi pada Konfrensi ICOM di Seoul, Korea Selatan tahun 2004 yang tercantum dalam *Code of Professional Ethics 2004*, sebagai berikut:

"A Museum is a non profit making permanent institution in the service of society and of its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, the tangible and intangible evidence and their environment."

Demikian dalam perkembangannya, pengertian museum mengalami perubahan dari masa ke masa. Secara umum, rumusan definisi yang lebih akhir memberi pemahaman bahwa museum adalah sebuah lembaga tetap yang tidak mencari keuntungan yang melayani masyarakat dan pengembangannya, terbuka untuk umum, yang bertugas untuk mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan dan memamerkan bukti-bukti peradaban manusia dan lingkungannya baik bersifat *tangible* (aspek fisik) maupun *intangible* (aspek non fisik) untuk tujuan pembelajaran, pendidikan dan hiburan. Perubahan penekanan pada revisi yang terakhir memberi pemahaman tentang pentingnya perhatian terhadap aspek *intangible* yaitu *pertama*, warisan peradaban manusia yang non fisik; dan *kedua*, informasi atau makna yang terkandung di balik bukti-bukti peradaban manusia yang dikoleksi oleh museum.

➤ Perubahan Paradigma

Aspek lain terhadap hakekat pengelolaan museum terletak pada paradigma yang menjadi prinsip dasar pengelolaan museum. Dalam perkembangannya, terjadi beberapa kali perubahan pada titik berat perhatian pengelolaan museum. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1880 sampai 1920 dengan titik perhatian pada koleksi sehingga melahirkan museologi sebagai pengetahuan dengan perspektif keprofesionalan. Perubahan kedua terjadi pada 1960-an, ditandai dengan perubahan peran museum yang lebih diarahkan pada pengembangan masyarakat. Terakhir, perubahan pengelolaan yang mengubah konsep profesionalisme ke dalam sebuah manajemen (Mensch, 1992: 4-5; Mensch, 2003: 3-5 dalam Aprianingrum, 2009: 1).

Perubahan titik perhatian pengelolaan museum sebagaimana dikemukakan di atas, sesungguhnya merupakan perubahan penyerta dari perubahan paradigma dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perubahan paradigma tersebut melahirkan epistemologi baru yang berhasil menunjukkan

keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan faktor sosial-budaya. Perkembangan selanjutnya, paradigma tersebut melahirkan pandangan baru yaitu teori kritis yang memosisikan diri sebagai teori yang mencerahkan dengan berusaha menyingkap segala hal yang menutup kenyataan yang tidak manusiawi dalam kesadaran dan pemikiran manusia modern (Lubis, 2006: ix-x dan 12-13; Mansyur, 2010:1). Perubahan paradigma dalam ilmu sosial-budaya ini tampak jelas dalam perkembangan aktivitas permuseuman yang dipusatkan pada masyarakat, dari “tentang sesuatu” menjadi “untuk seseorang” (Magetsari, 2008: 7-8; Mansyur, 2010: 1). Perkembangan teori kritis selanjutnya melahirkan paham baru yaitu komunikasi dialogis sebagaimana dikemukakan oleh Habermas. Menurut paham ini, masing-masing pihak berperan aktif sehingga saling pengertian dapat tercapai, bentuk komunikasi seperti ini sering disebut rasionalitas komunikatif (Lubis, 2006: 32; Mansyur, 2010: 1). Dalam konteks museologi, paham ini tampak jelas pada model keterlibatan masyarakat baik dalam hal menentukan warisan budaya (memori kolektif) yang akan dilestarikan maupun keterlibatan dalam pengelolaan museum.

Perubahan ini tampak jelas pada awal 1970-an dengan adanya pendekatan metodologis museologi yang diidentifikasi sebagai *new museology* atau “museologi baru”. Dalam “museologi baru”, museum berangkat dari kebutuhan masyarakat yang lebih menekankan peran sosial dari warisan budaya (Mensch, 2003: 7; dalam Aprianingrum, 2009:2). Salah satu tokoh “museologi baru” Andrea Hauenschild (1988), kemudian memperkenalkan konsep ideal pengelolaan museum serta memberi batasan secara tegas melalui skema representasi tentang konsep museum tradisional (*traditional museum*) dan konsep museum baru (*new museum*). Dalam konteks perubahan pendekatan tersebut, museum tidak hanya sekadar merawat dan melindungi untuk kemudian memamerkan koleksinya, tetapi merupakan sebuah lembaga kebudayaan yang dituntut untuk memberi pengetahuan dan pengalaman yang berorientasi pada pengembangan masyarakat.

Dalam kaitan dengan representasi skematis tersebut, Hauenschild (1988), mengemukakan bahwa museum bentuk baru secara ideal “tidak memiliki pembatas-pembatas arsitektural, tidak memiliki batas-batas disipliner dan tidak memiliki penghambat-penghambat terhadap akses masyarakat sehingga menjadi institusi yang terbuka”. Dengan demikian, konsep-konsep inovatif terhadap unsur-unsur pembentuk museum, yaitu: pertama, koleksi adalah keseluruhan warisan; *kedua*, bangunan adalah keseluruhan wilayah;

dan, *ketiga*, masyarakat adalah keseluruhan populasi (Rivard, 1984a: 7; Sola 1987: 48; Hauenschild, 1988: 11 dan 19, dalam Mansyur; 2010: 59). Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi profesional yang bekerja di museum dituntut untuk melakukan re-orientasi peran terhadap masyarakat.

Tuntutan masyarakat terhadap re-orientasi peran museum sebagai bagian dari perkembangan pengelolaan museum kemudian melahirkan bentuk-bentuk baru pengelolaan museum. Bentuk-bentuk pengelolaan museum, yaitu: *community museum (ecomuseum)*, *the inclusive museum*, dan *lieux de mémoire*. Ketiga bentuk pengelolaan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan museum, tidak hanya teknis pengelolaan tetapi juga masyarakat berhak menentukan warisan budaya yang akan dijadikan sebagai memori kolektif. Secara umum, ketiga bentuk pengelolaan ini bertujuan untuk pengembangan masyarakat tidak hanya aspek budaya tetapi juga sosial dan ekonomi. Penekanan pada bentuk *community museum* lebih diarahkan pada bentuk penyajian yang tidak terbatas pada sebuah bangunan, tetapi dimana saja dalam suatu wilayah tertentu. Pengelola museum adalah masyarakat itu sendiri bekerjasama dengan profesional museum sebagai mitra. Bentuk pengelolaan *inclusive museum*, lebih diarahkan pada peran museum sebagai agen perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Bentuk pengelolaan museum seperti ini bersifat lebih dinamis dan terbuka terhadap berbagai perubahan sesuai dengan keinginan masyarakat. Sementara itu, *lieux de mémoire*, lebih diarahkan pada peran museum sebagai pelestari memori (peristiwa sejarah tertentu) dimana museum menjadi tempat penyimpanan pengetahuan tentang masa lampau yang pada gilirannya dapat dijadikan sumber daya memori bagi para pelaku sejarah dari waktu ke waktu (Magetsari, 2009 : 11).

Selanjutnya, untuk mencapai objektif institusi museum yaitu pengembangan masyarakat, museum diharapkan bertugas sebagai institusi pendidikan yang mampu menyadarkan masyarakat akan identitas mereka, memperkuat identitas tersebut serta membangun kepercayaan diri terhadap potensi yang mereka miliki. Hal serupa dikemukakan oleh Rivard (1984) dan Taborsky (1985), bahwa identitas adalah totalitas citra kelompok, masa lalu, masa kini serta masa depan kelompok masyarakat itu sendiri, dalam kaitan inilah museum berperan dalam proses “pencitraan positif” (dalam Hauenschild, 1988: 5). Dalam konteks ini pula, Taborsky (1985), menyebutkan bahwa peran dari museum adalah, pertama-tama, menempatkan populasi pada posisi dimana mereka mampu memvisualisasikan, menyadari serta menamai citra-citra tersebut. Hasil dari pencitraan inilah yang kemudian akan diwujudkan

dalam tingkat material maupun non-material dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ditambahkan pula oleh Rivard (1985), bahwa museum harus mampu untuk mencitrakan, memberi nama, mendefinisikan tujuan – sebagaimana yang ada dalam persepsi lokal sendiri – serta objek-objek yang memuaskan kebutuhan masyarakat (Hauenschild, 1988: 5). Demikian, museum dalam penyajiannya adalah memberi pencitraan pada identitas masyarakat, salah satunya berupa memori kolektif.

Tabel 1. Representasi Skematis Museum Baru dan Museum Tradisional

No.	Museum tradisional	Museum baru	
1.	Objektif	Perlindungan dan preservasi kebudayaan material tertentu	
2.	Prinsip dasar	Perlindungan terhadap objek	
3.	Struktur dan organisasi	<p>Institusionalisasi</p> <p>Pembentukan oleh pemerintah</p> <p>Terpusat pada bangunan museum</p> <p>Staf profesional</p> <p>Struktur hierarkis</p>	<p>Mencakup hidup sehari-hari masyarakat</p> <p>Pembangunan sosial</p> <p>Orientasi kemasyarakatan yang radikal dan luas</p> <p>Territorialitas</p> <p>Institusionalisasi terbatas</p> <p>Pembentukan oleh pemerintah</p> <p>Desentralisasi</p> <p>Partisipasi</p> <p>Kerja tim berdasarkan kesetaraan hak</p>
4.	Pendekatan	<p>Subjek: diekstrak dari kenyataan (objek ditempatkan di museum)</p> <p>Terbatasi oleh orientasi-disiplin ilmu</p> <p>Orientasi objek</p> <p>Orientasi masa lalu</p>	<p>Subjek: realitas kompleks</p> <p>interdisiplin</p> <p>Orientasi tematis</p> <p>Berkaitan dengan masa lalu, sekarang dan masa depan</p> <p>Kerja sama dengan organisasi-organisasi lokal/regional</p>
5.	Tugas-tugas	<p>Koleksi</p> <p>Dokumentasi</p> <p>Penelitian</p> <p>Konservasi</p> <p>Mediasi</p>	<p>Koleksi</p> <p>Dokumentasi</p> <p>Penelitian</p> <p>Konservasi</p> <p>Mediasi</p> <p>Pendidikan berkelanjutan</p> <p>Evaluasi</p>

Sumber: Hauenschild, 1988: 9-10

Negeri Sebagai Memori Kolektif Masyarakat Maluku

Sheila Watson (2007), menyebutkan bahwa memori merupakan representasi dari masa lalu yang dirasakan bersama oleh kelompok, yang menentukan identitas kelompok, mencerminkan kondisi saat ini, dan merupakan visi masa depan. Dengan demikian, memori merupakan sesuatu yang berproses dari pengalaman masa lalu dan membentuk identitas kolektif kelompok saat ini (Perdana, 2010: 26). Salah satu bentuk memori kolektif masyarakat Maluku adalah struktur pemerintahan yang tercermin saat ini dalam struktur pemerintahan tingkat bawah setingkat desa.

Sebagaimana disinggung pada awal tulisan ini bahwa sejarah pembentukan wilayah pemerintahan di Maluku memiliki karakteristik tersendiri yaitu adanya struktur pemerintahan tradisional yang disebut dengan negeri. Struktur pemerintahan yang menjadi karakteristik suatu daerah telah mendapat pengakuan melalui produk perundang-undangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di tingkat pusat, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 Tahun 2005. Produk perundang-undangan ini kemudian diturunkan di tingkat Pemerintah Provinsi, dengan penetapan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Propinsi Maluku (Lembaran Daerah Propinsi Maluku tahun 2005 No. 14) (Patikayhatu, 2009: 36).

Pilihan terhadap *negeri* sebagai salah satu memori kolektif masyarakat Maluku, setidaknya berlandaskan pada sejarah kebudayaan yang ada di Maluku. Struktur Pemerintahan Negeri adalah struktur pemerintahan adat yang dikenal luas oleh masyarakat di wilayah Provinsi Maluku. Struktur Pemerintahan ini, terutama dikenal luas di wilayah Maluku Tengah (Pulau Seram, Haruku, Saparua, dan Nusalaut), Buru serta Kota Ambon, untuk wilayah Maluku Tenggara dikenal “ohoy” dan “ratschap”, untuk Maluku Tenggara Barat dikenal “pnue”, “lekhé”, “momor”, “negeri”, untuk Kepulauan Aru dikenal “pnua”, “kampung” (Patty, 2007). Secara umum, pemerintahan negeri tetap memiliki kesamaan unsur-unsur pranata adat yaitu raja, saniri, kewang, sasi, kapitan, dan sebagainya (Patty, 2007; Pattikayhatu, 2009: 36-38). Dengan demikian, pemerintahan negeri telah menjadi identitas masyarakat Maluku dan mencerminkan kondisi yang ada saat ini.

Tidak dapat dikecualikan bahwa di kalangan masyarakat di beberapa wilayah negeri masih terdapat perdebatan tentang beberapa hal berkaitan dengan kedudukan Bapak Raja maupun orang-orang (marga) yang

berhak menjabat dewan saniri negeri. Meski demikian, hal tersebut tetap tidak mengurangi arti penting struktur pemerintahan negeri sebagai memori kolektif. Hal lain, bahwa wacana tentang pendirian museum negeri di Maluku lebih diarahkan pada pemahaman akan pentingnya melestarikan memori kolektif masyarakat, dan museum dengan perangkat teoretis dalam pengelolaannya mampu berperan untuk itu. Oleh karena itu, penting dikemukakan lebih awal bahwa wacana atas pendirian museum negeri harus melibatkan masyarakat sejak awal hingga pengelolaannya.

Selanjutnya, beberapa hal yang penting diperhatikan berkaitan dengan wacana pendirian museum negeri adalah warisan budaya apa saja yang dapat dilestarikan melalui museum. Pada umumnya, setiap wilayah negeri dapat diidentifikasi berbagai aspek tinggalan budaya baik materi maupun non-materi.

➤ *Aspek Budaya Tangible*

1. Baileo

Baileo adalah bangunan berarsitektur tradisional yang merupakan unsur utama dalam pelaksanaan pemerintahan negeri karena difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara-upacara adat dan tempat pertemuan adat (musyawarah). Sebagai bangunan tradisional yang memiliki simbol-simbol adat, baileo memiliki aturan terkait dengan pelaksanaan upacara maupun pertemuan adat. Daerah Maluku Tengah, bangunan baileo memiliki aturan-aturan terkait dengan persekutuan kelompok masyarakat yaitu Patasiwa dan Patalima. Baileo Negeri Noloth misalnya yang merupakan baileo kelompok patalima, memiliki aturan bahwa pembagian ruangan terbagi dua yang dibatasi oleh papan jalur tengah memanjang yang masing-masing menghadap ke arah gunung dan laut. Di sebelah arah gunung merupakan posisi bagi Raja dan Kepala Soa beserta staf negeri. Sementara itu, susunan ruangan yang menghadap ke laut merupakan posisi bagi tamu Raja dari negeri lain (Joseph, 1987: 87 dan 90). Keterlibatan masyarakat dari negeri lain tidak hanya dalam pelaksanaan pertemuan adat, tetapi juga dalam rangkaian upacara adat dan pembangunan baileo. Dengan demikian, baileo baik dari aspek fisik maupun non fisik memberi pemahaman tentang konsep membangun solidaritas antar negeri.

2. Negeri Lama

Saat ini, kesatuan wilayah permukiman yang terdiri atas negeri-negeri di Maluku pada umumnya berada di daerah pesisir. Sebelumnya, masyarakat yang tergabung dalam kesatuan wilayah negeri membentuk permukiman yang

berada di daerah perbukitan. Relokasi permukiman-permukiman ke daerah pesisir terjadi akibat adanya kontak dengan dunia luar, terutama pada masa V.O.C yaitu pada awal abad ke-17 dan masa Hindia Belanda pada abad ke-19. (Leirissa, 1982: 1-2). Saat ini, masyarakat mengenal permukiman-permukiman yang ada di daerah perbukitan tersebut dengan sebutan Negeri Lama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Ambon, kondisi umum negeri-negeri lama tersebut berupa susunan batu yang mengelilingi ruang inti pemukiman dan memiliki pintu gerbang. Selain sebagai pembatas teritorial ruang inti pemukiman, susunan batu keliling ini juga berfungsi sebagai pertahanan. Tinggalan arkeologi yang umum dijumpai pada situs-situs negeri lama diantaranya, fragmen gerabah, fragmen keramik, dan batu meja. Tinggalan-tinggalan arkeologi ini tentunya memberi petunjuk tentang pembagian ruang aktifitas pada situs negeri lama. Selain situs-situs negeri lama yang telah ditinggalkan, beberapa diantaranya masih difungsikan oleh masyarakat khususnya di daerah Maluku Tenggara. Negeri-negeri lama yang ada di Maluku Tenggara ini bahkan sarat dengan makna simbolik karena susunan batu yang mengelilingi ruang pemukiman menyerupai bentuk perahu dan sarat dengan pola ruang yang mengacu pada konsep perahu (de Jonge dan van Dijk, 1995 dalam Ririmase, 2007: 87-89). Dengan demikian, aspek simbolik atas pola ruang negeri lama di Maluku, diantaranya: memiliki keselarasan dengan alam, merupakan cerminan konstruksi sosial masyarakatnya, dan menjadi cermin kepercayaan masyarakat masa lalu di Maluku (Ririmase, 2007: 102-103). Dalam konteks inilah, pelestarian memori kolektif terhadap aspek simbolik negeri lama dapat diperankan oleh museum negeri.

3. Batu Pamali / Batu Meja

Batu pamali – dalam kajian arkeologi disebut dengan dolmen atau menhir – pada umumnya berupa susunan batu yang menyerupai bentuk meja yaitu bongkahan batu dengan permukaan yang datar pada bagian atas, berbentuk persegi, bentuk bulat maupun bentuk lain yang ditopang oleh tiga atau empat kaki yang juga terbuat dari batu. Dengan bentuk yang menyerupai meja tersebut, masyarakat di Maluku (khususnya di pulau Seram dan sekitarnya) menyebut *batu pamali* seperti ini dengan *Batu Meja*. Bentuk lain *batu pamali* adalah berupa bongkahan batuan tunggal berbentuk lonjong. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Ambon, *Batu Pamali* ditemukan di situs-situs permukiman kuna (negeri lama), dan di permukiman kontemporer (masa kini) (Ririmase, 2007: 94). *Batu pamali* dalam konteks permukiman kontemporer tentunya tidak terlepas dari unsur

utama dalam pemerintahan adat serta syarat utama dalam penyelenggaran upacara adat oleh masyarakat negeri bersangkutan. Pada umumnya, *Batu Pamali* ditempatkan dekat bangunan *baileo*, dan memiliki aturan tersendiri yang ditandai dari letak *batu pamali* pada halaman depan pintu masuk *baileo* yaitu antara laut dan *baileo* bagi kelompok masyarakat *Patasiwa* dan sebaliknya yaitu antara gunung dan *baileo* bagi kelompok masyarakat *Patalima* (Joseph, 1987: 85 dan 112). Selain fungsi sakral sebagai media pelaksanaan upacara adat, *batu meja* sekaligus merupakan perlambangan bagi kelompok-kelompok *soa* atau marga (Suryanto, 1998; Salhuteru, 2006; Ririmase, 2007).

4. Sumberdaya Arkeologi berkaitan dengan sejarah negeri

Sumberdaya arkeologi lain berupa bangunan, baik rumah tinggal maupun bangunan keagamaan sering dijumpai di negeri-negeri adat di Maluku. Rumah tinggal *Bapak Raja* misalnya seringkali merupakan bangunan dengan arsitektur kuna, bangunan lain yaitu Masjid Tua atau Gereja Tua. Masjid Tua dengan arsitektur tradisional dijumpai di negeri-negeri Islam, misalnya: Negeri Kaitetu, Rohomoni, dan lain-lain. Sementara itu, Gereja Tua dengan perpaduan arsitektur tradisional dan Eropa dijumpai di negeri-negeri Kristen. Bangunan lain berupa benteng pertahanan yang dibangun oleh Belanda, yang memiliki nilai sejarah terkait dengan berbagai peristiwa yang pernah terjadi. Keseluruhan tinggalan budaya berupa bangunan ini memiliki nilai dan makna bagi masyarakat, sehingga menjadi memori kolektif mereka. Tinggalan budaya lain, terkait dengan sejarah negeri mis: Meriam Nusantara di Elpaputih yang merupakan simbol kekuasaan dan erat kaitannya dengan perdagangan masa lampau (Handoko, 2006) dan Werinama yang memiliki keterkaitan dengan sejarah kedatangan orang-orang Banda (Mansyur, 2007), Kepala Tongkat di Sahulau dan Nuniali (Handoko, 2007a) yang merupakan bentuk penghargaan pada masa Pemerintahan Belanda (Leirissa, 1982: 1); Nekara di Gorom yang berfungsi sakral sebagai alat upacara dan memiliki keterkaitan dengan perdagangan masa lampau (Handoko, 2007b). Keseluruhan tinggalan budaya baik bangunan maupun artefak lepas yang merupakan koleksi negeri atau individu (penduduk) setelah melalui proses interpretasi memberi pemahaman tentang konstruksi sejarah suatu negeri. Dalam konteks ini pulalah keseluruhan konstruksi sejarah negeri merupakan memori kolektif yang harus dilestarikan.

➤ Aspek Budaya Intangible

1. Struktur Pemerintahan Negeri

Pelaksanaan pemerintahan negeri telah ada sejak dulu yang berlandaskan pada peran dan fungsi masing-masing institusi adat. Hal ini tergambar pada penyebaran pranata adat, pengakuan terhadap simbol-simbol adat, dan penyelenggaraan pemerintahan adat secara turun temurun (Patty, 2007). Konteks ini tentunya mengarah pada sistem pemerintahan yang berlaku sejak kedatangan Belanda (VOC) sekitar abad ke-17. Dijelaskan oleh Pattikayhatu (2009), bahwa struktur sosial masyarakat di Maluku telah mengalami perubahan seiring dengan perjalanan sejarah (baca: kepentingan Belanda), sehingga sulit untuk mengetahui struktur sosial secara jelas sebelum masa tersebut. Hal ini terutama karena data yang diperoleh bersumber pada dokumen tertulis dari abad ke-20 yang sering kurang lengkap (Leirissa, 1983: 11 dalam Pattikayhatu, 2009: 8). Gambaran singkat tentang struktur masyarakat di Maluku Tengah sebelum abad ke-17, disebutkan oleh RZ. Leirissa (1982), bahwa kelompok dasar masyarakat di Maluku Tengah disebut dengan *lumatau* yang terdiri atas kesatuan kekerabatan yang menganggap dirinya keseturunan (*genealogis*). Beberapa *lumatau* kemudian mengelompok menjadi satu sebagai *uku*, dan beberapa *uku* dinamakan *uli* (Leirissa, 1982: 1). Kelompok dasar inipun memiliki penyebaran yang berbeda-beda di beberapa daerah, di Maluku Tenggara disebut *Raham Jan*, dan di Kepulauan Aru disebut *Belang* (Maelisa, 2008: 48). Dengan demikian, struktur pemerintahan negeri memiliki karakteristik di tiap-tiap daerah di Maluku.

Struktur pemerintahan negeri, sebagaimana yang ada saat ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi) melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai struktur pemerintahan tingkat desa. Berlandaskan pada karakteristik tiap daerah, maka struktur pemerintahan negeri tentunya memerlukan kajian yang mendalam. Oleh karena itu, produk perundangan-undangan tentang pemerintahan negeri yang merupakan turunan dari Perda tersebut ditetapkan masing-masing oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah uraian tentang salah satu struktur pemerintahan negeri, sebagaimana berlaku di Kota Ambon dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon No. 3 Tahun 2008, yaitu:

(1) Pemerintahan Negeri terdiri atas:

a. saniri Rajapatti adalah penyelenggara pemerintahan adat;

- b. saniri Negeri Lengkap adalah badan legislatif Negeri yang melakukan fungsi pengawasan.
- (2) Saniri Rajapatti terdiri atas :
- a. raja yang merupakan kepala pemerintahan negeri;
 - b. para Kepala Soa yang merupakan pemimpin persekutuan teritorial *genealogis*;
 - c. perangkat Negeri yang merupakan unsur pelayanan yang terdiri atas Sekertaris Negeri dan Kepala Urusan dan pelaksana yang terdiri atas Marinyo dan Kewang.

(3) Saniri Negeri Lengkap terdiri atas :

 - a. raja sebagai Ketua;
 - b. wakil dari Soa sebagai anggota;
 - c. kepala adat sebagai anggota;
 - d. tua-tua Negeri sebagai anggota;
 - e. kepala Tukang sebagai anggota;
 - f. kewang sebagai anggota

2. Seni-Budaya

Masyarakat Maluku secara umum mengenal budaya tradisional yang masuk kategori kearifan lokal, diantaranya:

1. Musik lokal: Kapata, Suhat, Basaro, dan Lagu-Lagu Tanah.
- 2 Musik instrumental adalah :
 - a. Musik tiup, seperti Kulit Bia
 - b. Musik Tabu, seperti Tifa dan Totobuang
 - c. Musik gesek, seperti: musik gesek dari batok kelapa di Kei (Maluku Tenggara)

3. Seni Tari: Tari Pana dan Tari Kipas (Kepulauan Kei), Tari Tnabar Ilaa (Tanimbar), dan Tari Cakalele (Maluku Tengah).

Keseluruhan karya seni ini merupakan bentuk ekspresi dalam pembentukan karakter masyarakat Maluku yang berperan untuk menumbuhkan rasa ketahanan budaya (Maelisa, 2008: 53).

3. Kearifan Lokal lain

Masyarakat Maluku mengenal beberapa bentuk kearifan lokal, yang mengatur tentang hubungan kekerabatan, hubungan kerjasama dan tolong menolong, serta pemeliharaan lingkungan (Ajawaila, 2007). Bentuk-bentuk kearifan lokal inipun memiliki sebutan yang berbeda di tiap daerah, hubungan kekerabatan misalnya: di Maluku Tengah dikenal dengan *Pela Gandong*, di

Kei dikenal dengan *Tebeabel*, di Tanimbar dikenal dengan *Kida Bela* dan di Aru dikenal dengan *Jabu*. Hubungan kerjasama dan tolong menolong, di Maluku Tengah dikenal dengan *Masohi*, di Kei dikenal dengan *Mareu (Hamareu)* dan *Weer Warat*, di Tanimbar dikenal dengan *Simasale*, di Babar dikenal dengan *Nekohora*, di Kisar dikenal dengan *Teren*. Demikian halnya dengan pemeliharaan lingkungan, di Maluku Tengah dikenal dengan *Sasi*, di Maluku Tenggara dikenal dengan *Hawaer*, dan di Kepulauan Aru dikenal dengan *Hawer* (Maelisa, 2008: 49). Keseluruhan bentuk kearifan lokal ini memberikan makna keseimbangan pada hubungan manusia terhadap lingkungan, baik sosial maupun terhadap alam. Hubungan kekerabatan misalnya, memberi pemahaman pada bentuk persaudaraan diantara dua negeri. Demikian halnya dengan pemeliharaan lingkungan dalam bentuk *sasi* (atau sebutan lain) memberi pemahaman akan pentingnya menjaga sumberdaya alam melalui larangan terhadap eksplorasi alam untuk sementara waktu. Pada umumnya, bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut seringkali disertai dengan upacara adat, misalnya, *Panas Pela* untuk hubungan *pela gandong*, upacara tutup sasi atau buka sasi untuk sasi, dan upacara adat yang dilaksanakan untuk memulai sebuah kegiatan gotong royong pada bentuk kerjasama dan tolong menolong atau *Masohi*.

Demikian, uraian tentang potensi warisan budaya yang ada di Maluku, yaitu potensi yang terkait dengan aspek *tangible* maupun *intangible*. Keseluruhan potensi tersebut terangkum dalam satu kesatuan wilayah negeri baik lingkungan budaya maupun alam. Dalam konteks pendirian museum negeri, potensi ini nantinya dapat dijadikan sebagai koleksi museum. Pertanyaan selanjutnya adalah “bagaimana bentuk pengelolaan museum negeri tersebut”.

Eco Museum: Alternatif Bentuk Pengelolaan Museum Negeri

Dalam kaitan dengan wacana pendirian museum negeri, bentuk-bentuk baru pengelolaan museum sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya dapat menjadi alternatif pengelolaan. Konsep ideal yang dapat menjadi pilihan adalah *eco museum*, dimana tujuan atau visi pengelolaan museum diarahkan pada pelestarian warisan budaya berikut memori kolektif (makna) yang menyertainya. Visi *Mosna Eco Museum*, setidaknya dapat diadaptasi pada museum negeri yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial, serta perlindungan warisan budaya dan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan yang berkelanjutan. Demikian halnya, adaptasi terhadap misi, yaitu:

- melestarikan tradisi dan adat istiadat;

- menciptakan lingkungan yang baik untuk melakukan penelitian dan informasi masyarakat setempat, serta wisatawan;
- mempublikasikan informasi berkaitan dengan penyajian museum
- bekerjasama dengan organisasi lokal, nasional atau internasional dalam pengelolaan museum; dan
- melibatkan masyarakat lokal dalam perlindungan warisan budaya; (Mosna Eco Museum, 2011).

Dalam kerangka wacana pendirian museum negeri di Maluku, titik perhatian pada visi dan misi museum, selain aspek budaya juga aspek sosial dan ekonomi. Titik perhatian pada aspek budaya tentu saja adalah melestarikan tradisi dan adat istiadat masyarakat. Pada aspek pengembangan sosial, salah satu titik perhatian museum adalah berperan dalam upaya pemulihian konflik lokal (antar negeri) atau dalam konteks yang lebih luas yaitu pemulihian konflik sosial yang melanda Maluku di masa lalu. Sementara itu, titik perhatian pada aspek ekonomi, salah satunya adalah peran museum dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan kepariwisataan. Fokus perhatian museum negeri ini nantinya berorientasi pada kondisi lokal serta kepentingan-kepentingan dan kebutuhan khusus populasi yang berada di sekitarnya, hal ini sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan museum dalam pandangan “*new museum*”.

Bentuk pengelolaan *eco museum* adalah menampilkan keseluruhan aktifitas berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat yang ada di suatu wilayah. Bentuk penyajian berada pada satu bangunan yang merupakan pusat informasi tentang sejarah, tradisi dan adat istiadat. Namun, mengingat bentuk pengelolaan *eco museum* yang tidak terpusat pada satu bangunan saja, maka display atau penyajian koleksi tetap ditampilkan sesuai konteks aslinya (*insitu*). Dalam hal ini, bangunan yang berfungsi sebagai pusat informasi hanya menampilkan informasi awal dan menjadi pengantar bagi pengunjung untuk memahami totalitas warisan budaya negeri. Untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang sebuah informasi pada display/penyajian, maka pengunjung harus diarahkan untuk melihat langsung bentuk konkret penyajian tersebut.

Penting diperhatikan, bahwa museum negeri yang mengikuti konsep *eco museum* berimplikasi pada ruang lingkup penyajian informasi. Dalam hal ini, perhatian terhadap bentuk-bentuk inovasi sebagaimana pandangan “*new museum*”, yaitu: koleksi adalah keseluruhan warisan; bangunan adalah keseluruhan wilayah; dan masyarakat adalah keseluruhan populasi. Oleh karena itu, ruang lingkup dimaksud tidak terbatas pada ruang wilayah administratif saja, tetapi memperhatikan kesatuan wilayah budaya berdasarkan

sejarah negeri. Berdasarkan pada konteks sejarah negeri-negeri yang ada di Maluku, menunjukkan bahwa wilayah negeri yang ada saat ini adalah wilayah administratif. Masyarakat masih mengenal bahwa suatu negeri memiliki wilayah petuanan yang saat ini terbagi ke dalam wilayah administratif beberapa negeri. Di beberapa wilayah bahkan mengenal bahwa negeri-negeri adat yang ada saat ini, dulunya tergabung ke dalam satu kesatuan. Di pulau Haruku misalnya, dikenal *Amarima Hatuhaha* yaitu persekutuan lima negeri yaitu Rohomoni, Pelau, Kailolo, Kabao, dan Hulaliu. Oleh karena itu, latar sejarah, tradisi dan adat istiadat merupakan hal yang mutlak diperhatikan sebagai upaya untuk melestarikan memori kolektif pada negeri yang saling berdampingan. Untuk kasus di pulau Haruku ini, sekaligus dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi konflik yang sering melibatkan masyarakat di daerah tersebut.

Museum melalui display atau penyajian merupakan produk museum yang hendak disajikan sebagai upaya memberi pemahaman kepada pengunjung. Melalui display inilah museum berupaya menyampaikan pesan yang hendak disampaikan dengan melakukan pencitraan positif (sebagaimana diistilahkan oleh Hauenschlild) terhadap koleksi yang dimilikinya. Pencitraan dimaksud, dilakukan dengan menyusun sebuah alur penyajian sesuai dengan pesan apa yang hendak disampaikan. Diharapkan, melalui pencitraan inilah koleksi yang dimiliki oleh museum mampu mempresentasikan dan mengkomunikasikan sebuah pesan kepada pengunjung. Negeri-negeri yang ada di Pulau Haruku sebagai contoh, museum nantinya dapat berperan sebagai salah satu bentuk pendekatan budaya dalam mengurangi konflik di wilayah tersebut. Bawa pesan yang ingin disampaikan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat pada memori kolektif yang telah mereka miliki dalam menghadapi kerawanan konflik di antara mereka. Dalam konteks yang lebih luas, yaitu kerangka pemulihian konflik di Maluku, bentuk pencitraan positif seperti ini harus menjadi titik perhatian pada museum negeri nantinya. Ikatan kekerabatan dalam bentuk *pela gandong* atau ikatan kerjasama dalam bentuk *masohi* untuk pembangunan atau renovasi bangunan keagamaan (gereja dan masjid) dapat diarahkan pada konteks pencitraan positif tersebut.

Penyajian seperti ini dalam aktifitas pengelolaan museum merupakan bentuk pendekatan empiris yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang koleksi. Selanjutnya, dalam kerangka menyampaikan pesan kepada pengunjung, dilakukan bentuk pendekatan kedua yaitu pendekatan filosofis yang lebih memusatkan pada penyusunan program (Magetsari, 2009: 3). Dengan melakukan kedua bentuk pendekatan tersebut, pelaksanaan aktifitas pengelolaan museum dalam kerangka teoretisnya bersifat heuristik, untuk itu

penting melakukan proses evaluasi berkelanjutan untuk menguji bahwa pesan yang hendak disampaikan dapat ditangkap oleh pengunjung.

Selanjutnya, bentuk pengelolaan *eco museum* lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan museum dapat menerapkan karakter struktur dan organisasi yang menjadikan museum sebagai institusi yang dinamis dan bukan institusi yang kaku sehingga lebih mengarahkan pada kerja tim dan kesetaraan hak (Rivard, 1984 dalam Hauenschild, 1988: 6). Dalam konteks pendirian museum negeri, museum dapat dikelola oleh masyarakat yang dibagi dalam beberapa kelompok dan nantinya secara bergiliran akan diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan museum. Dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan museum, akan lebih terbuka kesempatan untuk menerapkan karakter struktur dan organisasi berdasarkan pandangan “*new museum*”, yaitu pendanaan dari sumberdaya lokal, partisipasi masyarakat, kerja tim yang didasarkan pada kesetaraan hak dan bersifat desentralisasi atau tidak terfokus pada bangunan museum.

Sementara itu, bentuk pendekatan sebagaimana dalam pandangan “*new museum*”, menyebutkan bahwa subjek didasarkan pada realitas yang kompleks; interdisiplin; berorientasi tematis; berkaitan dengan masa lalu, masa kini dan masa depan; serta melakukan kerjasama dengan organisasi lokal. Pemahaman terhadap bentuk pendekatan pertama yang menyatakan subjek didasarkan pada realitas yang kompleks, dapat dipahami bahwa kondisi kekinian masyarakat-lah yang menentukan arah pengembangan pengelolaan museum. Oleh karena itu, bentuk pendekatan kedua dipahami sebagai bentuk kerjasama antar disiplin ilmu dalam pengelolaan museum. Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagai bentuk kerjasama dalam pengelolaan museum untuk menyajikan tema-tema berdasarkan interpretasi berbagai disiplin terhadap kondisi kekinian masyarakat, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pendekatan ketiga yaitu penyajian museum yang berorientasi tematis. Sementara itu, bentuk pendekatan yang berkaitan dengan masa lalu, masa kini dan masa depan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan nilai-nilai masa lalu tertentu untuk memunculkan kesadaran masa kini. Dengan bentuk seperti ini, museum membantu masyarakat untuk memahami potensi yang mereka miliki sebagai modal dasar bagi pengembangan masyarakat bersangkutan.

PENUTUP

Wilayah provinsi Maluku memiliki warisan budaya baik tangible maupun intangible yang merupakan memori kolektif masyarakat. Salah satunya

adalah pemerintahan adat disebut negeri yang merupakan karakteristik sistem pemerintahan di Maluku. Pemerintahan negeri adalah sistem pemerintahan tingkat bawah yang merangkum berbagai potensi warisan budaya yang menjadi milik masyarakat adat. Dalam konteks pemanfaatan warisan budaya, potensi tersebut dapat diarahkan pada berbagai aspek yaitu sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu bentuk pemanfaatan warisan budaya yang dapat diarahkan pada ketiga aspek tersebut adalah melalui penyajian museum. Titik perhatian terhadap upaya melestarikan memori kolektif merupakan arah pemanfaatan pada aspek budaya, pada aspek sosial pemanfaatan warisan budaya dapat diarahkan pada pengembangan masyarakat untuk menjalin solidaritas dalam kerangka pemulihian konflik di Maluku.

Sejarah perkembangan permuseuman baik aspek teoretis maupun teknis telah melahirkan bentuk baru pengelolaan museum. Berawal dari ketertarikan mengumpulkan benda-benda yang dianggap unik, kini museum telah berkembang sebagai pelestari memori kolektif dan media penguatan identitas. Demikian halnya, museum yang sebelumnya berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan benda-benda, kini museum telah berkembang sebagai media komunikasi yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Perubahan ini merupakan bentuk baru pengelolaan museum yang merupakan bagian dari tuntutan atau kritik masyarakat terhadap fungsi dan peran museum (baca: warisan budaya). Seiring dengan perubahan tersebut masyarakat semakin kritis dan menuntut keterlibatan mereka dalam pengelolaan museum.

Salah satu bentuk baru dalam pengelolaan museum yang melibatkan masyarakat adalah *ecomuseum*. Pilihan terhadap bentuk pengelolaan *ecomuseum* sangat tepat mengingat masyarakat adalah pemilik warisan budaya, dimana masyarakat menjadi objek sekaligus subjek dalam pengelolaan museum (warisan budaya). Dalam kerangka ini, disadari sepenuhnya bahwa (seharusnya) upaya melestarikan memori kolektif melalui museum negeri tidak lagi sekedar wacana. Dengan demikian, sebuah upaya untuk merentang jalan harmonisasi dalam upaya pemulihian konflik (Handoko, 2005), dan membingkai citra pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ririmasse, 2007: 116) dapat terangkum dalam sebuah bentuk pengelolaan *ecomuseum* yaitu museum negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajawaila, J.W., 2007. "Dimensi Tata Kelembagaan dan Pranata Adat". www.latupatimaluku.blogspot.com 15 Oktober 2010.
- Anonim, 2011. Mosna Eco Museum. www.mosnaecomuseum.com 15 Oktober 2010.
- Aprianingrum, A.Y., 2009. "Interpretasi dan Komunikasi: Studi Kasus Museum Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta". *Tesis*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya: Jakarta: Universitas Indonesia. Tidak Terbit.
- Handoko, Wuri. 2005 Pendidikan Arkeologi Merentang Jalan Harmonisasi. *Kapata Arkeologi* Vol.1 No. 1 Agustus 2005. Ambon. Balai Arkeologi Ambon
- _____, 2007 *Peran Strategis Wilayah Kepulauan Gorom dalam Kontak Awal Budaya, Perkembangan Perdagangan dan Budaya Islam di Maluku. Berita Penelitian Arkeologi (BPA)* Vol. 2 Nomor 4 Tahun 2007. Balai Arkeologi Ambon
- Hauenschchild, Andrea. 1988. *Claim and Reality of New Museology: Case Studies in Canada, The United States and Mexico*. Paris: ICOM.
- Hudson, Kenneth. 1987. *"Museum of Influence*. London: Cambridge University Press.
- Joseph, L.C., 1987. *Seni Arsitektur Tradisional Daerah Maluku Tengah*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Leirissa, dkk., 1982. *Maluku Tengah di Masa Lampau: Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Maelisa, S.H., 2008. Pengembangan Kajian Kearifan Lokal dalam Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam *Kapata Edisi Khusus Mei 2008 ISSN 1858-4101*: 46-58, Ambon: Balai Arkeologi Ambon.
- Magetsari, Noerhadi. 2009. "Pemaknaan Museum untuk Masa Kini". Makalah disampaikan dalam "Diskusi dan Komunikasi Museum", di Jambi tanggal 4-7 Mei 2009. Tidak Terbit.
- Mansyur, Syahruddin. 2007. "Laporan Penelitian Arkeologi di Wilayah Kecamatan Werinama". Ambon: Balai Arkeologi Ambon. Tidak Terbit.
- _____, 2010. "Konstruksi Baru Pameran Museum Kota Makassar". *Tesis*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya: Jakarta: Universitas Indonesia. Tidak Terbit.
- Patikayhatu, dkk., 2009. "Sejarah Negeri dan Desa di Kota Ambon", *Draft Buku*. Ambon: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Tidak Terbit.
- Patty, J., 2007. "Sistem Pemerintahan Adat di Maluku". diakses dari www.latupatimaluku.blogspot.com, tanggal 15 Oktober 2010.
- Perdana, A., 2010. "Museum La Galigo sebagai Media Komunikasi Identitas Budaya Sulawesi Selatan". *Tesis*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya: Jakarta: Universitas Indonesia. Tidak Terbit.
- Pinna, Giovanni. 2001. "Introduction to Historic House Museums" dalam *Museum International No. 210 Vol. 53*. Paris: UNESCO.
- Ririmase, M., 2007. "Manajemen Sumber Daya Budaya sebagai Dasar Pengembangan Pariwisata di Maluku". dalam *Kapata Edisi Khusus Mei 2008 ISSN 1858-4101*: 84-98, Ambon: Balai Arkeologi Ambon.

- Salam, A., 2010. "Pembentukan Identitas Masyarakat Kota Tarakan Melalui Museum Sejarah", *Tesis*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Jakarta: Universitas Indonesia. Tidak Terbit.
- Salhuteru, Marlyn. 2006. Tinggalan Megalitik di Desa Tuahaha Kecamatan Saparua Maluku Tengah. *Kapata Arkeologi* Vol 2No.3. Balai Arkeologi Ambon
- Sulistiyowati, Dian. 2009. "Strategi Edukasi Museum dan Pemasarannya: Studi Kasus Museum Sejarah Jakarta". *Tesis*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya: Jakarta: Universitas Indonesia. Tidak Terbit.
- Suryanto, Diman 1998. Penelitian Arkeologi di Desa Tuahaha dan Iha, Kecamatan Saparua. Kabupaten Maluku Tengah. *Laporan Penelitian Arkeologi*: Balai Arkeologi Ambon.
- Szekeres, Viv., 2005. *Changing Headsets : The Impact of Museums on Social Thingking*. Autralia-Israel Hawke Centre lecture.
- Zulkarnen, I., 2010. "Pertalian Darah Terkoyak di Tarakan". diakses dari www.kompas.com, tanggal 15 Oktober 2010.